

Kerentanan Sosial pada Komunitas Pemulung di Perkotaan

Social Vulnerability among Urban Waste Pickers Community

***Mayang Puti Seruni¹, Rakhmat Hidayat²**

¹⁻²Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur,

**Email: mayang.puti@unj.ac.id*

Abstract

The waste picker community faces social exclusion and poverty, resulting in a high degree of social vulnerability. To implement effective social policies, it is crucial to understand the complex social vulnerabilities experienced by these individuals. This study aims to illuminate the extent of deprivation faced by urban Indonesian waste pickers in the modern world, revealing not only the intricacies and depth of their vulnerabilities but also the contributing factors. A qualitative research approach was employed, consisting of interviews and observations within a South Tangerang waste picker community from 2014 to 2018. The findings reveal that waste pickers' vulnerabilities stem from interrelated, multidimensional, and layered deprivations. These vulnerabilities should not be viewed as isolated individual conditions but rather as collective community experiences. Consequently, social policies must be developed with a focus on the collectivity of waste pickers, taking into account their relationships and vulnerabilities, and implemented progressively over time.

Keywords: *Social Vulnerability, Waste Pickers Community, Urban Poor, Deprivation*

Abstrak

Komunitas pemulung hidup dalam eksklusi sosial dan kemiskinan, yang menyebabkan derajat kerentanan sosial mereka tinggi. Kebijakan sosial yang tepat tidak akan bisa terlaksana jika tidak diketahui kompleksitas kerentanan sosial yang dialami pemulung. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana pemulung di perkotaan Indonesia mengalami deprivasi dalam dunia modern, sehingga dapat terungkap bukan hanya lapisan-lapisan dan kedalaman dari kerentanan mereka, tetapi juga beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Untuk itu, peneliti melakukan studi kualitatif dengan wawancara dan observasi pada satu komunitas pemulung di kota Tangerang Selatan, sejak tahun 2014 hingga 2018. Hasil temuan menunjukkan bahwa kerentanan yang dialami pemulung disebabkan oleh deprivasi yang berlapis, multidimensional dan saling berkaitan. Kerentanan pemulung juga tidak dapat dipahami sebagai kondisi individual, tapi pengalaman kolektif yang berbasis komunitas. Oleh sebab itu, kebijakan sosial yang dikembangkan harus memahami kolektivitas pemulung tersebut, harus menimbang semua relasi dan kerentanan yang dimiliki pemulung, dan harus dilaksanakan secara bertahap dalam waktu yang tidak sebentar.

Kata Kunci: *Kerentanan Sosial, Komunitas Pemulung, Kaum Miskin Kota, Deprivasi*

A. Pendahuluan

Pekerjaan pada sektor ekonomi informal tidak diregulasi oleh pemerintah dan pekerjanya tidak mendapat perlindungan (Marques dkk. 2021). Sektor informal memegang peranan yang besar dalam perekonomian negara *MICs* dan *LICs* (Brown dan McGranahan 2016), termasuk Indonesia. Sejumlah besar populasi yang tereksklusi maupun mengeksklusikan diri dari sektor formal mencari sumber daya dengan menciptakan dan melalui sektor informal, termasuk di antaranya adalah pemulung (Zolnikov dkk. 2018). Pemulung adalah bagian yang melekat dan penting di dalam sistem manajemen sampah di perkotaan, terutama di kota-kota negara berpendapatan sedang (*Middle-Income Countries (MICs)*) dan rendah (*Lower-Income Countries (LICs)*) (Dias 2016).

Tanpa adanya pemulung yang mengumpulkan sampah dari rumah tangga, pertokoan, pasar, dan industri, pengelolaan sampah di negara-negara tersebut akan menjadi beban besar bagi negara, baik dari segi ekonomi maupun birokrasi. Keberadaan pemulung meringankan sebagian dari persoalan tersebut. Meskipun demikian, peran yang besar ini tidak diakui baik oleh negara maupun masyarakat, dan pemulung hidup dalam kondisi yang buruk (Gutberlet 2021). Dengan demikian, pemulung bukan hanya membantu pemerintah dalam pengelolaan sampah, tetapi juga berkontribusi bagi perkembangan ekonomi negara (Gall dkk. 2020).

Ironisnya, dengan peran yang begitu signifikan, pemulung justru menjadi salah satu komunitas dengan deprivasi sosial yang paling tinggi, bersifat kompleks dan beragam. Studi-studi terdahulu tentang kerentanan pemulung telah mengeksplorasi berbagai isu yang terkait dengan deprivasi yang dialami oleh pemulung seperti deprivasi ekonomi, kesehatan (Cruvinel dkk. 2019; Gutberlet dan Uddin 2017), kualitas hidup (Carl et al. 2019; Uddin et al. 2020), dan isu gender (Florence Bonnet 2019; Marques dkk. 2021). Sebagai masyarakat miskin kota, pemulung memiliki kualitas hidup yang rendah dan juga meliputi persoalan tempat tinggal, sanitasi, kualitas makanan, dan lain-lain. Selain itu, sifat dari pekerjaan mereka juga memang sangat rentan dengan masalah kesehatan (Cruvinel dkk. 2019; Florence Bonnet 2019; International Labour Office

(ILO) 2018; Schenck dkk. 2019; Zolnikov dkk. 2018). Hal ini terjadi karena pemulung menangani berbagai jenis sampah. Mereka yang beroperasi di tempat pembuangan (*landfills*), berpotensi terpapar pada sampah berbahaya. Meskipun tidak selalu beracun ataupun berbahaya, sampah rumah tangga pun tidak sepenuhnya aman dan dapat membahayakan jika tidak dipungut dan ditangani dengan tepat (Cruvinel dkk. 2019; Gutberlet dan Uddin 2017).

Kondisi lain yang juga kerap dihadapi pemulung adalah masalah isolasi, eksklusivitas sosial, dan kebudayaan yang berakibat pada rendahnya kesempatan mereka untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi (Uddin dkk. 2020). Pada dekade terakhir, pemulung mendapatkan ancaman baru; mulai merambahnya privatisasi di area hulu industri daur ulang sampah yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan pemulung tradisional (Chen dan Carré 2020). Isu daur ulang sampah semakin populer dan nilai industrinya semakin meningkat, sehingga pebisnis besar tertarik untuk ikut mengelola sampah dari rantai terbawahnya dan menjadi pesaing bagi para pemulung.

Berbagai permasalahan di atas menyebabkan pemulung memiliki kerentanan sosial yang tidak hanya tinggi tetapi juga berlapis-lapis (Marques dkk. 2021). Dampak pandemi covid-19 terhadap sosial dan ekonomi dunia menjadi salah satu contoh betapa rentannya masyarakat pemulung. Pembatasan sosial, penurunan harga plastik murni (karena penurunan harga minyak), dan gangguan ekonomi nasional secara keseluruhan telah membuat para pemulung semakin jauh ke dalam lubang kemiskinan (Carenbauer 2021). Ini menunjukkan kerentanan mereka di hadapan bencana dan perubahan sosial.

Menilik kondisi deprivasi yang serius di tengah besarnya peran dan fungsi komunitas pemulung di daerah perkotaan, artikel ini secara umum bertujuan untuk menjelaskan tingkat kerentanan yang dimiliki oleh para pemulung dengan menggambarkan keunikan kehidupan mereka serta keterkaitan antara berbagai deprivasi yang mereka alami dalam konteks kekinian di perkotaan Indonesia. Berdasarkan penelusuran penulis, hal ini belum banyak diungkap oleh studi-studi yang ada sebelumnya. Memahami kompleksitas dari

kerentanan bukanlah hal yang mudah, sehingga tidak heran jika aspek tersebut belum banyak mendapatkan perhatian (Michael, Deshpande, dan Ziervogel 2019). Eksplorasi terhadap kerentanan pemulung dibutuhkan untuk dapat memahami marjinalitas dan ketidakadilan yang dialami oleh pemulung. Oleh karena itu, secara spesifik, kajian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dan sejauh apa pemulung di perkotaan Indonesia mengalami deprivasi dalam dunia modern, sehingga dapat terungkap bukan hanya lapisan-lapisan dan kedalaman dari kerentanan mereka, tetapi juga kesenjangan dan diskriminasi yang mereka hadapi sehari-hari.

B. Metode

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Lokasi penelitian adalah di salah satu lapak pemulung yang ada di wilayah pinggiran TPA Cipeucang, Tangerang Selatan (lapak Bandar H). Lapak tersebut dipilih karena cukup memiliki dinamika dari tahun ke tahun. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara dan diskusi terarah, yang dikombinasikan dengan observasi lapangan dan penelitian data sekunder. Wawancara dan observasi dilakukan baik secara semi-terstruktur maupun tidak terstruktur. Pemilihan informan dilakukan dengan dua teknik, yaitu *purposive sampling* dan *snowball sampling*; ditentukan sesuai dengan karakter informan. Penelitian dilakukan pada dua waktu yang berbeda; pertama pada rentang waktu 2014-2016, kedua pada tahun 2018. Meskipun demikian familiaritas dengan lokasi dan subyek penelitian telah terjalin sejak tahun 2012, dan pada tahun 2020 dilakukan pembaruan data lapangan. Validasi data dilakukan dengan melakukan verifikasi berulang baik kepada narasumber, maupun melalui observasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kerentanan Sosial Budaya

Pemulung mengalami kerentanan sosial budaya yang multidimensional. Mereka bukan hanya memiliki kualitas hidup yang buruk, tetapi juga

kekurangan modal sosial dan budaya, sulit untuk mengakses berbagai institusi sosial, dan menghadapi isolasi yang terstruktur baik dari pemerintah maupun masyarakat. Kerentanan sosial budaya pemulung dijelaskan sebagai berikut:

a. Kerentanan dalam Aspek Kesehatan

Salah satu kerentanan yang sering diasosiasikan dengan pemulung adalah kesehatan dan kebersihan. Kerentanan utamanya berasal dari beberapa persoalan. Pertama, berkaitan dengan kurangnya dana untuk biaya pengobatan. Sebagian pemulung tidak pergi berobat ketika sakit karena tidak memiliki dana, meskipun sakitnya sudah cukup parah. Kedua, pemulung dan keluarga rentan mendapatkan cedera dan penyakit. Hal ini berkaitan dengan sifat pekerjaan yang tidak aman dan gaya hidup yang kurang berkualitas. Pemulung menangani berbagai macam sampah tanpa alat perlindungan yang layak, dan seringkali harus memanggul beban yang berat untuk waktu lama. Selain itu, lingkungan lapak sangat kumuh, sehingga penghuninya gampang terkena penyakit; terutama anak-anak. Hunian lapak sangat padat dan kontak dekat sehingga penyakit mudah menular. Konsumsi makanan dan minuman keluarga pemulung juga tidak baik. Anak buah laki-laki pada umumnya perokok aktif. Mereka sangat rutin makan mie instan. Anak-anak juga sering mengonsumsi makanan dan minuman bergizi buruk dan berbahaya.



Gambar 1.
Pemulung Menangani Sampah di Halaman Rumah



Gambar 2.
Hunian Lapak Pemulung

Kerentanan ketiga, ketika salah seorang anggota keluarga pemulung sakit, aspek ekonomi mereka langsung terganggu. Terutama jika yang sakit adalah pencari nafkah utama. Keluarga salah seorang pemulung (inisial F) pernah kesulitan memenuhi kebutuhan makan harian ketika ia sebagai pencari nafkah utama jatuh sakit yang cukup parah. Istrinya harus berganti-ganti pekerjaan untuk menopang hidup mereka. Pak F mengungkapkan:

"Dulu saya sakit, istri saya nyari. Sampe ngamen dia mah. Pernah ngemis, nuntunin orang buta. Saking nggak ada yang diusahainnya. Dulu pas saya sakit paru-paru. Flek, karena rokok. Berobat saya 6 bulan, nggak merokok. Gratis berobatnya."

Pekerjaan yang dilakukan oleh istrinya tidak membutuhkan banyak sumber daya. Unikny, ia tidak mengakui berbagai pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan, tetapi menganggapnya sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mencari uang ketika sudah tidak ada lagi yang bisa diusahakan.

Pengalaman yang serupa juga dialami oleh keluarga pemulung lainnya. Salah seorang pemulung Wanita (Ma) mengungkapkan bahwa ia tidak dapat menabung, meskipun selama ini memiliki pendapatan tertinggi di lapak dan bergaya hidup cukup hemat. Hal ini disebabkan ia harus mengeluarkan biaya cukup besar untuk pengobatan suaminya yang sakit-sakitan. Ironisnya, suaminya terkenal sering mengonsumsi minuman beralkohol, meskipun memiliki banyak penyakit. Dahulunya mereka memulung bersama, sehingga pendapatan keluarga lebih tinggi. Dengan sakitnya sang suami, pendapatan menjadi berkurang.

Kerentanan ekonomi akibat gangguan kesehatan tidak hanya terjadi jika pencari nafkah utama yang sakit. Pemulung wanita lainnya (Mu) juga terpaksa berhenti bertani karena anaknya sakit parah akibat kecelakaan lalu lintas. Diturunkan olehnya:

"Anak saya pertama laki, itu dulu tabrak lari. Rumah saya dijual yang di rangkas, dipake buat bayar operasi. Orang nggak sadarnya aja 2 minggu... Abis 350 juta. Rumah sakitnya aja siang malem itu 3 juta. Siang malam di ruangan ICU. Belum makannya kan. Belum tunggu dia kan. Saya jaga 1 bulan itu di rumah sakit. Apa nggak keblenger."

Ia harus menjual tanah pertaniannya dan rumahnya di kampung untuk itu. Setelah itu, ia tidak lagi memiliki sumber daya, baik untuk bertani ataupun untuk berdagang. Ia akhirnya menjadi pemulung; pekerjaan yang belum pernah ia lakoni sebelumnya.

Isu kesehatan merupakan salah satu permasalahan pemulung yang paling sering diangkat oleh studi-studi seputar pemulung. Diantaranya adalah penelitian Uddin dan Gutberlet (2018; 2017; 2020) di Mongolia dan negara-negara lainnya; Cruvinel dkk., (2020) di Brazil dan Amerika Latin; Zolnikov dkk., (2018) di Brazil; Schenck dkk., (2019) di Afrika Selatan; dan studi-studi lainnya yang sejenis. Namun banyak dari studi tersebut yang kurang memberi pendalaman pada aspek kerentanan kesehatan pemulung sebagai suatu unit keluarga dan sebagai suatu komunitas. Isu kesehatan keluarga pemulung sangat penting diangkat ketika membahas mengenai kerentanan pemulung karena keluarga pemulung umumnya berasal dari masyarakat miskin dengan ikatan yang masih cukup kuat. Kondisi kesehatan anggota keluarga seringkali menjadi beban bersama. Mereka juga seringkali merupakan keluarga dengan satu pencari nafkah utama. Dengan demikian, pencari nafkah tersebut mengemban satu-satunya tanggung jawab ekonomi. Selain itu, pekerjaan memulung mengandalkan kondisi fisik yang prima. Dengan kata lain, fisik yang sehat adalah modal utama dari pemulung. Ketika pencari nafkah utama cedera atau sakit, ekonomi keluarga terguncang.

b. Rendahnya Kualitas Hidup

Selain masalah kesehatan, pemulung juga seringkali dikaitkan dengan kondisi dan kualitas hidup yang buruk. Sejumlah isu mengemuka terkait dengan hal ini. Salah satu yang menonjol adalah lingkungan dan kondisi fisik yang kumuh. Sebagian besar pemulung sadar akan kebersihan dan kerapian. Mereka juga lebih memilih pekerjaan yang lebih bersih, jika memungkinkan. Salah seorang pemulung (inisial N) menuturkan bahwa salah satu kelebihan profesi *jual-beli* (tukang loak) yang dulu pernah ia lakoni, ketimbang *tukang bongkar muat* (sejenis memulung di tempat pembuangan) yang merupakan pekerjaannya saat ini, adalah kondisi kerjanya yang lebih bersih. Pelaku *jual-beli* tidak memungut

dan mengais sampah. Ia harus bersih dan tidak berbau busuk ketika bekerja *jual-beli*, sebab area operandinya adalah rumah warga dan universitas, yang berarti berinteraksi langsung dengan warga. Ia berpendapat bahwa orang-orang tidak akan mau berdagang dengannya jika ia kumuh dan berbau tidak sedap. Dinyatakan oleh N:

“Jual-beli (tukang loak) itu enaknyanya dari nyari (pemulung) itu, jual beli itu bersih. Bersih itu artinya nggak kotor-kotor amat, nggak blok-blok (kotor sekali). ya barangnya, ya orangnya. Pakaiannya nggak blok-blok (kotor) amat. Kalau di tempat bongkaran (dalam pekerjaan bongkar muat) kan kita blok gitu, sampah sampai ke mari-mari (menunjuk seputaran lengan atasnya dan badannya). Kalau jual-beli (tukang loak), kita pergi begini, balik ya begini lagi, sama. Apalagi pas di Depok, harus bersih. Soalnya saya kan nyamperin ke kos-kosan... Dagang tu harus bersih. Kalau kotor kan bau. Kalo bau kan orang gimana katanya, orang nggak mau dekat... Sama juga kita jualan warung, harus ada daya tarik.”

Bukan hanya lingkungan kerja, lapak juga tidak rapi dan tidak bersih. Hal ini utamanya disebabkan oleh pengerjaan pemilahan sampah yang dilakukan di lapak. Sehingga di dalam lapak banyak ditemukan sampah yang bertumpuk. Pada kondisi tertentu, lapak bisa menjadi berbau sangat busuk. Misalnya ketika bandar mendapatkan kiriman sampah dalam jumlah sangat besar. Tumpukan sampah tersebut mengeluarkan aroma yang menyengat, terutama jika cuaca sedang panas terik. Kondisi ini menjadi persoalan yang mengkhawatirkan, karena pemulung dan keluarga tinggal di dalam lapak. Lapak terdiri dari *bedeng-bedeng*, yang merupakan bilik hunian bandar dan pemulung. Bukan hanya bagian halaman lapak yang kumuh, namun begitu juga di dalam *bedeng*. *Bedeng* berlantakan tanah dan penghuni umumnya tidak mencuci kaki dulu sebelum masuk *bedeng*. Beberapa anak bahkan bermain di sekitar sampah tanpa alas kaki, dan masuk ke dalam *bedeng* sebelum membersihkan diri. Salah satu akibatnya, keluarga pemulung di lapak memiliki alas kasur yang kotor.

Kamar mandi lapak dan toilet juga tidak dibangun dengan layak. Untuk puluhan penghuni, kamar mandi dan toilet hanya ada satu, bangunannya tidak permanen, ringkih, dan tidak memiliki atap. Sumber air tidak banyak (hanya ada di kamar mandi dan tempat mencuci), dan tempat mencuci pakaian juga tidak luas.



Gambar 4.
Bilik Kamar Mandi



Gambar 5.
Bilik Toilet

Kondisi yang minim privasi ini diperparah oleh jarak bedeng yang terlalu rapat dan ukurannya yang terlalu kecil. Akibatnya penghuni lapak umumnya mengetahui urusan rumah tangga masing-masing. Kepadatan yang tinggi dan masalah privasi membuat kehidupan lapak rentan konflik. Keluarga pemulung tinggal pada lingkungan seperti ini. Di antaranya banyak anak kecil. Kondisi demikian bukan hanya tidak layak bagi orang dewasa, tetapi terutama juga tidak layak bagi anak-anak. Persoalan anak seringkali menjadi pemicu konflik antar sesama penghuni lapak. Diturunkan oleh Ma:

“(konflik) Bikin nggak tenang. Hubungan nggak enak gitu, hidup nggak enak... Nggak mau nyari ribut. Sini bocah berantem sama si itu, ya orang tuanya ribut juga nantinya... Nggak mau deket-deket sama yang suka nyari ribut. Yang waras ngalah”

Penghuni lapak, terutama lelaki dewasa, gemar melakukan pesta miras. Beberapa kali mereka juga melakukan perjudian di lapak, dan digerebek oleh polisi. Kondisi ini alasan lainnya mengapa lapak tidak layak dihuni oleh keluarga dengan anak kecil. Lingkungan perumahan pemulung di sekitar TPA Cipeucang dibangun seperti ini. Perumahan yang tidak layak menyebabkan pemulung rentan dalam hal kesehatan jiwa dan raga, kualitas kehidupan keluarga, kualitas kehidupan sosial, dan berpengaruh dalam perkembangan citra diri mereka.

c. Kurangnya modal sosial dan budaya

Salah satu penyebab kerentanan pemulung adalah kurangnya modal. Bukan hanya modal ekonomi, tetapi juga modal sosial dan budaya. Pemulung di lapak Bandar H memiliki tingkat pendidikan rendah dan minim keahlian. Pun memiliki keahlian, tetapi seringkali tidak memiliki akses pada pekerjaan. Contohnya salah satu pemulung (inisial Ma), yang bisa menjahit dan membordir, tetapi tidak dapat bekerja dengan keahlian tersebut karena ia tidak memiliki pengetahuan tentang lokasi konveksi di daerah rantau. Dulunya ia bekerja menjahit di daerah Palmerah. Tapi karena tiba-tiba terpaksa pindah ke wilayah baru (Serpong), ia tidak lagi memiliki akses pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pengetahuan dan jaringan sosial. Jaringan sosial salah satunya diperlukan sebagai penjamin hidup, terutama bagi masyarakat rentan.

Salah satu jaringan sosial yang sering dimanfaatkan oleh pemulung adalah anggota keluarga. Diceritakan oleh pemulung lainnya (inisial Mu):

“Modal dulu kan masih ada orang tua kan enak saja, dimodalin orangtua. Sekarang kan nggak ada siapa-siapa kan mau minta sama siapa. Suami nggak punya. Namanya hidup sendiri itu susah, kalau nggak ada saudara.”

Meskipun hubungan keluarga merupakan suatu jaringan sosial, namun bagi masyarakat rentan, jaringan sosial keluarga bukan hal yang selalu bisa diandalkan. Anggota keluarga masyarakat rentan umumnya juga tidak memiliki banyak sumber daya, sehingga tidak dapat dijadikan sandaran. Seperti yang diekspresikan oleh Mu, walaupun anggota keluarga dapat memberi dukungan, tetapi bantuan lenyap ketika keluarga tersebut meninggal atau menghilang; sebab minimnya sumber daya yang dapat diwariskan atau ditinggalkan. Kurangnya kepemilikan modal sosial dan budaya saling berkaitan dengan kepemilikan modal ekonomi. Kurangnya modal sosial budaya pemulung membuat mereka kesulitan untuk membangun modal ekonomi mereka.

d. Kerentanan Kehidupan Keluarga

Rentannya kehidupan keluarga pemulung bukan hanya berkaitan dengan kualitas hidup yang kurang layak di lapak, tetapi juga berkaitan dengan kualitas

berkeluarga yang tidak layak secara umum. Keluarga pemulung rentan untuk terpisah dalam waktu yang lama tanpa bertemu ataupun berkomunikasi lewat media teknologi. Kesulitan ini biasanya terkait dengan masalah jarak dan biaya. Banyak dari pemulung sudah lama tidak bertemu pasangan dan anak-anaknya, dikarenakan keluarganya tinggal di kampung. Pemulung F sudah lama tidak bertemu dengan anaknya yang sulung. Pemulung N tidak bertemu anaknya sudah lebih lama lagi. Ia mengungkapkan:

“Anak di kampung, istri di kampung. Status lagi pisah dengan istri... (Usia anak) 12 tahunan. Sekolah. Saya nggak pernah ngeliat, udah berapa tahun ini. Kalau saya pikirin mah udah wah, udah ngayal sampe jalan raya kali. Cuma saya cuekin, seolah-olah saya nggak punya masalah. Saya cuek sama masalah. Terakhir ketemu (anak) umur 9 tahun...”

Pemulung Mu dan Ma juga sudah sangat lama tidak berhubungan dengan keluarganya, termasuk dengan anak-anaknya. Mengunjungi kampung memakan biaya yang cukup besar sehingga mereka tidak bisa sering menengok keluarga. Mereka juga tidak dapat sering berkomunikasi, karena keterbatasan akses pada media teknologi komunikasi.

Pekerja sektor informal seperti pemulung terus mewariskan kerentanannya pada orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan orang tua (Anon 2019b); sebab kemiskinan yang mereka rasakan secara komunal. Hal ini terutama dialami secara khas oleh pemulung, yang sebagian besarnya bermigrasi dari desa ke kota dengan membawa anggota keluarga. Kerentanan di aspek kesehatan, kualitas hidup, dan modal sosial budaya dirasakan secara satu kesatuan keluarga. Karakter ekonomi informal yang tidak diakui dan kurang dianggap bernilai menyebabkan keluarga-keluarga dalam sektor informal tersebut tidak hanya mengalami deprivasi, tetapi juga tidak diperhatikan oleh kebijakan publik (Anon 2019a). Hal ini berpotensi untuk menjadikan kondisi deprivasi keluarga pemulung berjalan secara sirkular; dimana mereka sulit untuk keluar dari kondisi yang rentan.

e. Isolasi dari Pemerintah dan Masyarakat

Komunitas pemulung bukanlah komunitas yang inklusif. Mereka menarik diri dari bergaul dengan masyarakat umum, sekaligus juga dialienasi oleh pemerintah dan masyarakat. Pemulung enggan untuk berinteraksi dengan institusi dan masyarakat salah satunya sebab citra diri yang telah terbangun dalam diri mereka. Asumsi pemulung bahwa orang lain menganggap mereka hina bukan sekedar muncul dari hasil imajinasi sepihak saja. Pendapat demikian timbul dari hasil interaksi dengan orang lain di luar lapak. Salah satu keluarga pemulung (inisial A dan istrinya, Ri) memiliki trauma terkait dengan profesi sang suami sebagai pemulung. Sang istri menceritakan bahwa ia dan keluarga sering mendapat diskriminasi dan pelecehan verbal, karena pekerjaan suaminya. Dikisahkan oleh Ri:

"Saya sering didzolimi mbak, bapaknya juga. Dulu pernah ada ibu-ibu marah ke anaknya karena main ama si Al (anak pemulung A), "Jangan main sama dia, itu anak pemulung". Saya dengar mbak, saya samperin aja. Sakit hati saya. Saya bilang, "saya juga nggak mau terlahir sebagai istri pemulung, tapi mau apa lagi". Orang-orang sini aja bilang, "berani amat lu, gw mah nggak berani"."

Pemulung mengungkapkan bahwa mereka sering dituduh sebagai pelaku pencurian ketika terjadi kehilangan di perumahan atau perkampungan yang mereka lalui untuk bekerja. Mereka juga merasa orang-orang memperhatikan mereka ketika mereka memulung. Mereka berpendapat orang lain mencurigai mereka sebagai pelaku kriminalitas. Pemulung F mengatur dirinya agar terhindar dari masalah yang demikian dengan berangkat setelah matahari terbit. Ia juga tidak sembarangan mengambil sampah di halaman rumah orang lain. Jika ada benda berharga di halaman rumah yang sedang kosong, maka ia tidak akan memulung disana. Ia mengatakan ia pun tidak berani masuk ke dalam perkantoran atau institusi seperti bank atau sekolah. Diungkapkan oleh F:

"...Saya nyari di sampah-sampah aja. Kalo saya nyari di jalanan aja, yang nggeletak-nggletak. Saya mah ngeri mbak kalo gitu-gitu (mencari sampah di dalam kantor, instansi, dan rumah), takut salah sangka. Saya misalnya nih nemu paku, tapi disono ada kandang ayamnya; saya cuma berani ambil paku kalo ada orangnya. Nggak berani sembarangan."

Jika warga di tempat memulung tidak suka dengan perilaku pemulung, sangsi yang diterima bisa berat. Warga dapat menolak pemulung untuk mencari

sampah di tempat sampahnya, atau mengusir sama sekali secara permanen dari perumahan, atau yang paling berat melaporkan pemulung ke polisi.

Kebanyakan pemulung hampir tidak pernah berinteraksi langsung dengan lembaga atau institusi di luar lingkungan mereka. Oleh sebab itu, pada umumnya mereka tidak menjadi peserta dalam institusi baik yang dikelola negara maupun yang tidak. Sebagian anak dari pemulung yang tinggal di lapak tidak bersekolah, kecuali jika anak mereka tinggal di kampung. Pemulung di lapak umumnya tidak memiliki KTP Tangerang Selatan, kartu kesehatan (seperti KIS, atau BPJS), kartu pendidikan (KIP), maupun rekening bank. Mereka bahkan sangat jarang berbelanja di pertokoan. Pada umumnya sektor formal mensyaratkan kualitas dan derajat pendidikan tertentu kepada calon pekerja. Kalaupun tidak ada persyaratan pendidikan, paling tidak diprasyaratkan tanda pengenal yang valid oleh pemberi pekerjaan kepada pihak pelamar pekerjaan. Institusi seperti perbankan pun mensyaratkan hal yang sama kepada pengusaha yang hendak mengajukan pinjaman. Hal ini menjadi penghambat utama bagi migran miskin yang tidak memiliki KTP (KTP yang akurat), ijazah pendidikan dan modal kerja.

Tingginya migrasi dari desa ke kota Tangerang Selatan menambah dinamika dalam persoalan tersebut, sebab migran miskin seringkali tidak memiliki kartu identitas setempat atau kartu identitas yang valid. Hal ini diutarakan oleh Ketua RT 03 selaku RT yang menaungi TPA Cipeucang. Ia mengatakan bahwa persoalan utama dari pendataan kependudukan di kawasannya adalah derasnya arus keluar-masuk pendatang, yang utamanya terjadi di lapak pemulung. Oleh sebab itu sulit baginya untuk mencatat secara pasti jumlah dan profil pemulung di kawasan tersebut. Bagi organisasi RT, pencatatan penduduk penting diantaranya untuk mengawasi keamanan lingkungan, mengetahui informasi mengenai penduduk, dan mempermudah pelaksanaan program dan kegiatan yang diluncurkan pemerintah untuk masyarakat. Sulitnya mengikuti perkembangan dan dinamika lapak oleh negara salah satunya disebabkan oleh hal ini.

Kartu identitas tidak hanya menjadi persoalan bagi negara, tetapi terlebih lagi bagi migran yang terkait. Ketidak-validan tanda pengenal penduduk menghilangkan hak politik individu dan menghambat individu untuk masuk ke ataupun terlibat di dalam institusi formal. Pemulung A, misalnya, tidak ikut dalam pemilihan presiden dan juga pemilihan kepala daerah yang terakhir sebab kartu identitasnya bukan hanya tidak berlaku di daerah Tangerang Selatan, tetapi juga sudah kadaluwarsa; yang artinya tidak dapat digunakan dimanapun di negara Indonesia. Pemulung A telah dan masih mengusahakan untuk memperbaharui Kartu Keluarganya dan membuat surat keterangan pindah di kampungnya di Karawang agar dapat membuat KTP berbasis Tangerang Selatan. Usaha tersebut sudah bertahun-tahun dilakukan tapi tidak berhasil sebab banyaknya kendala yang ia temui di kampung. Menurutnya ditengarai oleh keengganan aktor pemerintah untuk melancarkan urusannya jika tidak ada biaya tambahan berupa *uang pelicin*. Pemulung A tidak memiliki uang lebih untuk menyukseskan pembuatan KTP barunya, sehingga sampai saat penelitian ini rampung ia tidak memiliki KTP yang valid. Hal tersebut mengecewakan untuknya disebabkan oleh beberapa hal. Ia mengungkapkan,

“KTP ada saya KTP... Kemaren pemilu nggak ikut, KTPnya bukan orang sini. Padahal penyenn nyoblos... Saya nggak bisa pulang (kampung), akhirnya nggak ikutan (pemilu)... Mau urus kemaren di kampung, tapi saya nggak ada duit. Harus ada uang pelicin... pengen kayak orang kebanyakan... Saya dulu pengen kerja di pabrik, tapi nggak bisa kan. Katanya KTPnya udah mati... (Kerja di pabrik) Buat nambah-nambah pengalaman aja mbak” (Wawancara dengan Pak A)

Bukan saja ia tidak memiliki kartu identitas, tetapi ia juga tidak memiliki ijazah SD. Dengan kondisi demikian, kesempatannya untuk bekerja di sektor formal sangat kecil.

Sementara itu, memulung merupakan bidang kerja yang mudah untuk dimasuki. Syarat penerimaan pemulung oleh bandar tidak didasarkan pada dokumen ataupun informasi legal; tetapi lebih berbasis pada adanya masa percobaan, insting bandar, kepercayaan, dan alasan-alasan pribadi bandar. Dengan banyaknya eksklusi yang diterima oleh migran miskin, sektor informal merupakan pemberi kesempatan hidup. Meskipun demikian, sangat kurangnya

perlindungan yang diterima oleh tenaga kerja di sektor informal, membuat kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI menetapkan visi untuk menghilangkan kegiatan ekonomi tersebut di Indonesia. Dengan didorongnya kegiatan informal menjadi formal, maka diharapkan masyarakat marjinal di dalam sektor informal mendapatkan hak-hak yang sepatutnya.

Banyak studi di beberapa negara yang mulai memberikan perhatian pada pemulung mengemukakan bahwa kebijakan publik yang berpihak dan inklusif dapat memperbaiki kondisi kerentanan dan deprivasi pemulung (Gutberlet 2021; Parra 2020; Traoré dan Ouedraogo 2021). Namun pemulung TPA Cipeucang sangat asing dengan Pemerintah Tangerang Selatan. Permasalahannya, instansi tersebut tidak memandang pemulung sebagai aktor ekonomi, melainkan hanya sebatas masyarakat marjinal. Sehingga kebijakan yang menyangkut pemulung hanya di atur di dalam bidang pemberdayaan masyarakat marjinal. Program pemberdayaan itu pun tidak berjalan efektif. Komunitas lapak mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah mendengar ataupun terlibat dalam program pemerintah apa pun, termasuk program pemberdayaan dari pemerintah Tangerang Selatan. Ketidakpedulian yang diperlihatkan oleh negara bukan hanya berkontribusi melahirkan deprivasi dan kerentanan bagi komunitas pemulung, tetapi juga menciptakan suatu isolasi yang membuat komunitas pemulung tidak dapat keluar dari kondisi deprivasi dan kerentanan mereka, serta terus mewariskannya ke generasi yang berikutnya.

f. Gangguan Kepercayaan Diri

Sifat dari pekerjaan pemulung, dan hasil dari eksklusi yang dilakukan oleh negara dan masyarakat, membuat komunitas pemulung mengembangkan citra diri yang negatif. Memulung adalah sesuatu yang dianggap hina oleh pemulung itu sendiri, dan mereka beranggapan masyarakat menganggap mereka menjijikkan. Sebagaimana diutarakan oleh pemulung Ma:

“Kalau kata orang kita ini orang hina. Orang kaya kalau sama kita geli”

Pemikiran ini berdampak pada kepercayaan diri mereka. Pemulung merasa malu pada pekerjaan dan diri mereka. Beberapa pihak mengatakan bahwa keberadaan peneliti membuat pemulung tidak nyaman. Bahkan, ketika

peneliti mengungkapkan keinginan untuk mengikuti pemulung bekerja, bandar menanyakan kepada peneliti apakah peneliti tidak malu terlihat bersama pemulung di jalan. Pemulung A merasa terintimidasi ketika peneliti menemaninya bekerja memulung di jalan. Beberapa kali ia meminta maaf pada peneliti ketika hendak memungut sampah. Ada pula penghuni lapak yang tidak ingin memberitahu keluarganya mengenai pekerjaannya sebagai tukang pilah sampah. Ia tidak mengizinkan keluarganya untuk datang ke tempat tinggalnya karena alasan tersebut. Jika ingin bertemu, ia lah yang akan pergi ke rumah keluarganya. Rasa rendah diri semacam ini hampir merata diadopsi oleh para pemulung.

Komunitas pemulung bukan hanya dieksklusi, tetapi juga 'mengeksklusi' diri mereka sendiri. Mereka enggan berinteraksi langsung dengan masyarakat maupun institusi. Adapun pemulung A yang memiliki tabungan di bank, tidak ingin membuka rekening sendirian. Ia meminta pertolongan pada tetangganya, T (yang bukan bagian dari komunitas pemulung), untuk membuat rekening dan mengelolanya. Jika membutuhkan barang tertentu, mereka berbelanja di warung, atau membeli pada teman (seperti tv, sepeda motor, dan lainnya). Jika sakit, tidak banyak pemulung yang berobat ke rumah sakit; pada umumnya memilih untuk berobat ke seorang bidan (Bidan Y). Sebagian besar dari mereka bahkan tidak mau masuk ke dalam bangunan yang tampak 'serius', termasuk bangunan lembaga negara (seperti puskesmas) dan lainnya seperti bank. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh kurangnya penerimaan dari masyarakat luas, tetapi juga adanya citra diri negatif yang menekan kepercayaan diri. Menariknya, hal ini berbeda dengan bandar. Bandar tidak terlalu sungkan untuk berhubungan dengan instansi. Ia memiliki hubungan dengan bank dan tidak takut mencoba teknologi baru yang dapat menguntungkan usahanya. Meskipun kualitas hidup mereka tidak terlalu jauh berbeda, tetapi bandar memiliki kepercayaan diri yang lebih besar daripada pemulung.

2. Kerentanan Ekonomi

a. Rendahnya Pendapatan dan Kepemilikan Aset

Salah satu permasalahan pemulung yang juga paling tampak jelas adalah minimnya kepemilikan materi; di antaranya adalah pendapatan yang rendah dan tidak adanya aset. Hal ini merembet pada deprivasi yang lain (seperti telah dibahas sebelumnya). Pendapatan pemulung sangat bervariasi, tetapi yang paling produktif di antara mereka hanya mampu mengumpulkan uang Rp.1.000.000 hingga Rp. 1.300.000 sebulan di luar uang makan. Uang makan adalah insentif harian atau mingguan yang diberikan oleh bandar. Insentif ini adalah hutang, yang nantinya akan ditagih ketika pemulung menjual sampah ke bandar. Jumlahnya kira-kira Rp.20.000 hingga Rp.70.000 dalam sehari, tergantung pada kesanggupan anak buah untuk membayarnya nanti di hari penimbangan atau tergantung pada kebijaksanaan mereka masing-masing. Sebagian dari mereka tidak ingin berhutang dan atau berhutang banyak pada bos. Pemulung di lapak Bandar H mendapatkan uang 'makan' Rp.50.000 dalam sehari, dihitung untuk 2-3 kali makan. Bandar memberikannya di pagi hari, untuk membiayai kebutuhan keluarga pemulung di hari itu. Meskipun uang tersebut adalah salah satu ikatan antara bandar dengan pemulung, namun tidak semua pemulung mau menerima uang makan. Pemulung Ma adalah salah satunya. Ia mengatakan:

"Saya nggak pake (uang makan). Sama aja hasilnya. Malahan suka ntar-ntar bos ngasihnya. Mending utuh aja pas nimbang. Dapetnya sama aja saya."

Rata-rata pemulung berpenghasilan Rp.300.000 hingga Rp.600.000 dalam satu bulan (Setelah dipotong hutang *uang makan*). Pendapatan mereka akan lebih baik jika memiliki pasangan yang juga bekerja. Akan tetapi hal ini sulit dilakukan ketika mereka sudah memiliki anak. Biasanya istri akan berhenti bekerja luar, dan beralih membantu memilah sampah pulungan suaminya. Karena pendapatan yang kecil, seringkali memulung bukanlah profesi yang pertama dipilih oleh aktor. Salah seorang pemulung berpendapat, pemulung adalah pekerjaan yang dilakoni karena sedang tidak ada pekerjaan lain; ia menyebutnya sebagai pekerjaan '*mentok*' (buntu).

Pemulung yang membawa anak istrinya ikut ke lapak memiliki tanggung jawab keuangan yang lebih besar, ketimbang mereka yang istri dan anaknya di kampung. Meninggalkan anggota keluarga di kampung bisa berarti penghematan. Misalnya salah seorang pemulung yang meninggalkan anak sulungnya di kampung bersama orangtua istrinya. Ia tidak lagi bertanggung jawab atas anaknya tersebut secara keuangan, karena sudah dibiayai oleh nenek dan kakek sang anak. Memiliki keluarga di lapak juga berarti lebih dituntutnya kedisiplinan dan kerja keras. Karena banyaknya orang yang menjadi tanggungan sang pencari nafkah. Pemulung yang hidup di lapak dengan keluarga berpendapat bahwa ia harus lebih rajin daripada pemulung yang hidup sendirian.

Seorang pemulung yang dahulunya adalah *jual-beli* mengungkapkan bahwa kehidupannya dahulu sebagai *jual-beli* lebih baik daripada hidupnya kini sebagai *tukang bongkar muat*; meskipun ia dulu menghidupi keluarga sementara kini ia hidup sendiri. Bukan hanya pendapatan *jual-beli* lebih banyak daripada *tukang bongkar muat*, tetapi secara umum profesi tersebut juga lebih didambakan. Ada tiga hal yang membuat *jual-beli* lebih baik dibanding *tukang bongkar muat*. Pertama, karena pendapatannya yang lebih besar; kedua, *jual-beli* lebih bersih dan lebih bermartabat; ketiga, ia pun sudah akrab dengan sistem dan teknik *jual-beli*. Pendapatan yang lebih besar adalah hal yang penting bagi kebanyakan pemulung, sebagian alasannya karena dengan demikian mereka lebih mampu memberikan kehidupan yang layak pada keluarganya (contohnya menyediakan tempat tinggal yang lebih baik). Sifat *jual-beli* tidak kumuh, dan berbasis pada perdagangan juga meningkat harga diri pelakunya. *Jual-beli* tidak perlu memungut dan mencari sampah di tempat buangan seperti halnya pemulung. Orang *jual-beli* biasa berinteraksi dengan warga dan petugas di perkantoran, sehingga lebih memiliki kepercayaan diri.

Kerentanan lainnya dari golongan masyarakat minim modal ekonomi adalah tempat tinggal yang tidak terjamin. Mereka umumnya mengontrak atau tinggal secara ilegal di suatu lahan. Terkadang bangunan rumah pun tidak

permanen, seperti halnya lapak pemulung. Meskipun demikian, tanah yang disewa bandar dari tetangganya, adalah tanah milik pribadi, sehingga tidak ada masalah hukum. Status hunian yang legal memberikan suatu bentuk keamanan pada penghuninya. Salah seorang pemulung pindah dari hunian lamanya karena digusur. Ia kemudian pindah ke wilayah hidupnya sekarang. Perpindahannya yang terpaksa dan tak terencana, membuatnya asing dengan lingkungan baru. Sehingga ia tidak memiliki pengetahuan akan keberadaan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Oleh sebab itu ia akhirnya memutuskan untuk memulung. Meskipun memulung menurutnya adalah sebuah pilihan terakhir ketika tidak tersedia pekerjaan lain.

b. Hutang dan Konsumerisme

Selain karena kerentanan sosial, kerentanan ekonomi yang utama baik bagi pemulung maupun bandar berasal dari dua hal: hutang dan gaya hidup konsumtif. Hampir semua relasi hutang di lingkungan lapak pemulung bersifat riba. Artinya, memiliki semacam bunga. Relasi hutang dengan riba yang jelas berasal dari rentenir liar. Sebagian menamakan diri mereka bank keliling. Sebagian lagi muncul dengan nama jasa keamanan. Masing-masing memberikan bunga yang sangat tinggi (kira-kira 25% - 40%). Umumnya yang terjerat hutang dengan rentenir adalah bandar. Sementara itu, ada pula hutang dengan riba yang 'halus'. Contohnya adalah relasi pemulung lapak dengan bandar mereka. Meskipun bandar tidak menuntut bunga, tapi bandar menuntut diskon harga sebagai ganjaran hutang. Pemulung harus mau menjual dengan harga yang murah pada bandar sebagai ganti dari fasilitas yang sudah diterimanya, dan keuntungan dari ikatan (terutama ikatan *uang makan*) yang dijalaninya.

Hal ini terlihat cukup adil, karena bandar menyediakan fasilitas dengan gratis. Akan tetapi, masalahnya, pemulung cukup terpaksa untuk menerima situasi ini, sebab kebanyakan dari mereka tidak dapat menjual barang rongsokan selain kepada bandar. Sementara itu, para bandar lapak menetapkan standar harga yang kurang lebih sama di setiap lapak, sehingga berpindah lapak pun tidak akan memberikan hasil yang jauh berbeda untuk pemulung. Tidak banyak pemulung yang akhirnya memiliki daya untuk menjual langsung ke pengepul

dan pabrik. Tanpa melewati jalur bandar, pemulung sebenarnya akan mendapatkan keuntungan lebih besar. Namun, menempuh jalur ini juga dapat menimbulkan masalah baru; tanpa bandar mereka tidak memiliki jaring pengaman.

Selain hutang riba, ada pula hutang yang tidak berbunga, tapi turut merugikan orang-orang lapak. Hutang tersebut berasal dari tempat seperti warung. Hutang jenis ini biasanya bukanlah berkaitan dengan kebutuhan primer, akan tetapi kebutuhan tersier. Kebanyakan pemulung berhutang rokok dan jajanan anak. Konsumerisme ini membuat pemulung tidak bisa menyalakan uang, malah terkadang saldo mereka menjadi berkurang. Sayangnya orang-orang lapak sangat bergantung pada hutang, sehingga sudah menjadi gaya hidup. Mayoritas pemulung menyandarkan hidupnya pada pinjaman orang lain; bukan hanya pada bandar (biasanya berupa *uang makan*), tetapi juga pada warung. Mereka melunasi semuanya pada hari menimbang. Karena setiap hari banyak pemulung hidup dengan bergantung pada hutang, maka uang yang didapat dari hasil menimbang biasanya tidak banyak bersisa untuk hari esoknya. Dengan demikian, keesokan harinya pemulung akan berhutang kembali. Hal tersebut membuat pemulung sulit untuk menyimpan uang. Jika dikurangi kebutuhan hidup primer, pendapatannya sebenarnya memiliki sisa. Tetapi konsumsi yang besar akan gaya hidup tidak memungkinkan pemulung untuk menabung dan terbebas dari hidup berhutang.

Bukan hanya konsumsi makanan/minuman ringan, rokok, dan alkohol yang menyabotase penghasilan pemulung, konsumsi atas gaya hidup lainnya pun juga. Pemulung F mengungkapkan bahwa ia dan banyak orang lapak lainnya tidak bersedia mengkhitan anak mereka melalui khitanan masal meskipun gratis. Hal ini dikarenakan orang yang ikut khitanan masal akan dipandang sebagai orang miskin oleh orang lain di komunitas mereka. Contoh lainnya adalah pemulung A yang sempat kesulitan membayar pengobatan anaknya, tetapi tetap bisa memiliki sebuah motor. Kebiasaan demikian membuat

mereka lebih sulit untuk mengumpulkan modal dan lebih rentan untuk bergantung pada hutang.

Tukang bongkar muat yang mendapatkan upah tambahan dari kegiatan bongkar muat juga tetap membutuhkan hutang uang makan dari bandar. Ia menjelaskan, bahwa hal ini terjadi karena ia tidak selalu mendapat proyek di lahan pembuangan, sehingga tidak mendapat upah. Selain itu, laba dari jual beli sampah dengan bandar juga sedikit. Kurang lebih Rp.100.000 untuk 10 hingga 15 hari kerja. Sebagian pemulung lebih rentan ketimbang yang lainnya. Salah satunya pemulung perempuan yang sudah tua dan hidup sendiri (inisial Mu). Ia hampir tidak memiliki ketahanan. Ia membutuhkan hutang uang makan setiap 3 hari, karena sangat minimnya uang. Produktivitasnya rendah dan pendapatannya kecil, sehingga bandar pun hanya memberinya uang makan Rp.50.000 untuk 3 hari (yang lain mendapatkan uang makan Rp.50.000 untuk 1 hari). Oleh karena itu, ia harus menimbang secepatnya, yaitu 3 hari sekali agar bisa mendapatkan hutangan berikutnya. Fenomena keterikatan pada hutang dan gaya hidup konsumtif membuat komunitas pemulung tidak memiliki daya untuk membangun modal ekonomi. Sementara kepemilikan modal ekonomi dan kemampuan mengelolanya sangat erat kaitannya dengan keberdayaan diri. Kekurangan modal ekonomi membuat komunitas pemulung terjebak dalam kerentanan mereka.

3. Kerentanan Sosial Budaya dan Ekonomi: Kerentanan Pemulung yang Kompleks dan Multidimensional

Meskipun kerentanan pemulung terjadi baik secara sosial-budaya maupun ekonomi, akan tetapi keduanya tidak dapat terlepas satu sama lain. Kerentanan sosial erat kaitannya dengan kerentanan ekonomi. Kerentanan ekonomi, berkaitan erat dengan kerentanan sosial. Keduanya dapat saling mentransformasi satu sama lain. Rendahnya kepemilikan materi dapat membuat seseorang tereksklusi secara sosial, begitu pula sebaliknya. Kerentanan pada aspek kesehatan berkesinambungan dengan kerentanan ekonomi. Sebagian dari isu ini telah dibahas sebelumnya. Ketika sakit, pemulung membutuhkan uang lebih untuk berobat, yang kebanyakan mereka tidak punya. Ketika sakit, mereka

.....
juga tidak dapat mencari nafkah. Tidak adanya tabungan membuat mereka tidak memiliki ketahanan, sehingga dua permasalahan di atas menjadi masalah yang serius. Persoalannya, sebagian penyakit mereka berasal dari sumber daya ekonomi dan budaya yang rendah. Mereka kurang berdaya menyediakan lingkungan hidup yang bersih dan aman. Mereka kurang mampu menyediakan gizi baik untuk diri sendiri dan keluarga; pertama karena tidak adanya biaya untuk menopang konsumsi sehat, kedua karena kurang memiliki pengetahuan dan kesadaran mengenai gizi baik. Kemiskinan memiliki potensi besar untuk mengamankan eksistensinya.

Hambatan pemulung dari sisi kesehatan bukan hanya perihal penyakit, tetapi juga melemahnya fisik karena usia. Pemulung yang sudah tua memiliki keterbatasan bekerja. Mereka tidak sekuat rekan mereka yang lebih muda, baik dalam hal mengangkut dan mendorong sampah, maupun dalam hal lama berjalan. Dengan begitu pemulung yang tua mendapatkan kuantitas rongsokan yang lebih sedikit. Bukan hanya kerentanan kesehatan yang menjalin diri dengan persoalan ekonomi, isolasi dari institusi dan masyarakat juga demikian. Tertutupnya akses pada pendidikan, kesehatan dan dunia sosial, memperkecil kesempatan komunitas pemulung untuk meningkatkan kapabilitas ekonomi. Hal ini berarti menghambat juga pemulung untuk mendapatkan taraf dan kualitas hidup yang lebih baik. Relasi ini tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung. Tertutupnya akses pada institusi sosial dan isolasi dari masyarakat memberi gangguan pada kepercayaan diri. Masalah ini dapat menghambat pemulung untuk mampu mengembangkan perekonomiannya.

Di sini lah fungsi utama dari ikatan dengan bandar. Bandar dapat menyediakan jaring pengaman untuk pemulung lapaknya. Jika pemulung butuh pertolongan, bandar dapat membantu. Meskipun, dari hasil temuan di lapangan, kebanyakan persoalan kesehatan pemulung di lapak Bandar H hanya dipikirkan sendiri oleh mereka tanpa bantuan dari bandar. Paling tidak, bandar dapat menyediakan kredit berupa insentif dan sarana prasana hidup yang dibutuhkan

oleh pemulung. Hal ini menunjukkan, keberadaan bandar mengisi kekosongan dari peran negara. Komunitas lapak pemulung muncul sebagai bentuk resiliensi individu ketika negara gagal menyediakan fasilitas penghidupan bagi masyarakat miskin. Deprivasi dan kerentanan multidimensional yang dirasakan oleh pemulung mendorong mereka untuk menciptakan suatu komunitas sebagai jaring pengaman. Sayangnya, jaring pengaman tersebut sangat lemah, sehingga tidak dapat mengeluarkan mereka dari deprivasi dan kerentanan; malah, pada tingkatan tertentu, berpotensi untuk mengekang mereka di dalam lingkaran kerentanan yang tidak ada habisnya.

D. Penutup

Kerentanan sosial pemulung tidak hanya berasal dari kemiskinan uang, tetapi juga deprivasi yang mereka alami di berbagai dimensi kehidupan. Pemulung yang sebagian besar adalah migran generasi pertama kekurangan modal ekonomi, sosial, dan budaya yang mencukupi untuk dapat hidup layak di perkotaan. Deprivasi yang mereka alami melewati skala individual, melainkan harus dilihat pada level komunitas. Pemulung bukan individu yang berdiri sendiri, tetapi dunianya berkelindan dengan dunia orang-orang di sekelilingnya. Penghidupannya berjalan dalam konteks relasinya dengan orang lain. Kesejahteraannya tidak bergantung pada dirinya sendiri, tetapi juga pada orang-orang terdekatnya. Terlebih lagi karena seringkali pemulung hidup dalam kelompok, bukan perseorangan. Dengan demikian, ketika negara ataupun lembaga lainnya ingin merancang kebijakan dan program sosial, harus memahami bahwa pemulung bukanlah sekedar individu, tetapi mereka berbasis komunitas.

Relasi para pemulung dengan bandar, dengan komunitasnya, dengan keluarganya, dan dengan masyarakat adalah elemen yang sangat penting. Kebijakan mengenai pemulung juga tidak akan efektif jika hanya menysasar pada satu aspek kehidupan saja dari pemulung. Jika ingin mengeluarkan komunitas pemulung dari kerentanan, maka haruslah menargetkan semua dimensi kerentanan hidup mereka satu persatu; dengan demikian tidak akan bisa dilakukan secara instan dan temporer. Studi-studi pemberdayaan dan kebijakan

publik ke depannya membutuhkan pengetahuan mengenai dinamika ini untuk dapat melakukan analisa yang lebih tepat dan sesuai.

Daftar Pustaka

- Anon. 2019a. "Protecting informal economy workers and their dependents."
- Anon. 2019b. "Risks and vulnerabilities in the informal economy."
- Brown, Donald, dan Gordon McGranahan. 2016. "The urban informal economy, local inclusion and achieving a global green transformation." *Habitat International* 53. doi: 10.1016/j.habitatint.2015.11.002.
- Carenbauer, Mary Greene. 2021. "Essential or dismissible? Exploring the challenges of waste pickers in relation to COVID-19." *Geoforum* 120.
- Carl, By, Johan Vikblad, Denise Lekare, Carl Johan Vikblad, dan Denise Lekare. 2019. *The livelihoods of municipal solid waste workers – sustainable or a vicious cycle of debt and vulnerability ?*
- Chen, Marty, dan Françoise Carré. 2020. *The informal economy revisited: Examining the past, envisioning the future.*
- Cruvinel, Vanessa Resende Nogueira, Carla Pintas Marques, Vanessa Cardoso, Maria Rita Carvalho Garbi Novaes, Wildo Navegantes Araújo, Antonia Angulo-Tuesta, Patrícia Maria Fonseca Escalda, Dayani Galato, Petruza Brito, dan Everton Nunes Da Silva. 2019. "Health conditions and occupational risks in a novel group: Waste pickers in the largest open garbage dump in Latin America." *BMC Public Health* 19(1). doi: 10.1186/s12889-019-6879-x.
- Cruvinel, Vanessa Resende Nogueira, Tara Rava Zolnikov, Marcos Takashi Obara, Valmir Teotonio Lopes de Oliveira, Elisa Neves Vianna, Fabiana Sherine Ganem do Santos, Kenia Cristina de Oliveira, dan James A. Scott. 2020. "Vector-borne diseases in waste pickers in Brasilia, Brazil." *Waste Management* 105. doi: 10.1016/j.wasman.2020.02.001.
- Dias, Sonia Maria. 2016. "Waste pickers and cities." *Environment and Urbanization* 28(2). doi: 10.1177/0956247816657302.
- Florence Bonnet, Joann Vanek and Martha Chen. 2019. *Women and men in the informal economy: A statistical guide.* Vol. 3.
- Gall, Markus, Melanie Wiener, Cintia Chagas de Oliveira, Reinhold W. Lang, dan Erik G. Hansen. 2020. "Building a circular plastics economy with informal waste pickers: Recyclate quality, business model, and societal impacts."

- Resources, Conservation and Recycling* 156. doi: 10.1016/j.resconrec.2020.104685.
- Gutberlet, Jutta. 2021. "Grassroots waste picker organizations addressing the UN sustainable development goals." *World Development* 138. doi: 10.1016/j.worlddev.2020.105195.
- Gutberlet, Jutta, dan Sayed Mohammad Nazim Uddin. 2017. "Household waste and health risks affecting waste pickers and the environment in low- and middle-income countries." *International Journal of Occupational and Environmental Health* 23(4). doi: 10.1080/10773525.2018.1484996.
- International Labour Office (ILO). 2018. "World Employment Social Outlook: Trends for Women 2018 Global snapshot." *International Labor Organization*.
- Marques, Carla Pintas, Tara Rava Zolnikov, Juliana Machado de Noronha, Antonia Angulo-Tuesta, Morteza Bashashi, dan Vanessa Resende Nogueira Cruvinel. 2021. "Social vulnerabilities of female waste pickers in Brasília, Brazil." *Archives of Environmental and Occupational Health* 76(3). doi: 10.1080/19338244.2020.1787315.
- Michael, Kavya, Tanvi Deshpande, dan Gina Ziervogel. 2019. "Examining vulnerability in a dynamic urban setting: the case of Bangalore's interstate migrant waste pickers." *Climate and Development* 11(8). doi: 10.1080/17565529.2018.1531745.
- Parra, Federico. 2020. "The struggle of waste pickers in Colombia: From being considered trash, to being recognised as workers." *Anti-Trafficking Review* 2020(15). doi: 10.14197/atr.201220157.
- Schenck, Catherina J., Phillip F. Blaauw, Jacoba M. M. Viljoen, dan Elizabeth C. Swart. 2019. "Exploring the potential health risks faced by waste pickers on landfills in South Africa: A socio-ecological perspective." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 16(11). doi: 10.3390/ijerph16112059.
- Traoré, Jean Abel, dan Idrissa Mohamed Ouedraogo. 2021. "Public policies promoting the informal sector: Effects on incomes, employment and growth in Burkina Faso." *Journal of Policy Modeling* 43(1). doi: 10.1016/j.jpolmod.2020.08.002.
- Uddin, Sayed Mohammad Nazim, dan Jutta Gutberlet. 2018. "Livelihoods and health status of informal recyclers in Mongolia." *Resources, Conservation and Recycling* 134. doi: 10.1016/j.resconrec.2018.02.006.
- Uddin, Sayed Mohammad Nazim, Jutta Gutberlet, Anahita Ramezani, dan Sayed Mohammad Nasiruddin. 2020. "Experiencing the Everyday of Waste Pickers: A Sustainable Livelihoods and Health Assessment in Dhaka City, Bangladesh." *Journal of International Development* 32(6). doi: 10.1002/jid.3479.

Zolnikov, Tara Rava, Ruth Costa da Silva, Antonia Angulo Tuesta, Carla Pintas Marques, dan Vanessa Resende Nogueira Cruvinel. 2018. "Ineffective waste site closures in Brazil: A systematic review on continuing health conditions and occupational hazards of waste collectors." *Waste Management* 80.